



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RDP KOMISI III DPR RI DENGAN
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	: 2021/2022
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke-	: VII (Tujuh)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 29 Maret 2022
Waktu	: 14.00 WIB s.d 15.59 WIB
Ketua Rapat	: Pangeran Khairul Saleh / F- PAN / Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris Rapat	: Novianti, S.E / Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI
Acara	: 1. Capaian target PNBPN Tahun 2021 & target capaian PNBPN tahun 2022 serta renstra Program Prioritas 2022; 2. Pelaksanaan Tupoksi dalam rangka optimalisasi Penyelamatan Keuangan Negara serta meningkatkan target PNBPN; 3. Masukan terhadap RUU Tentang Perubahan Kedua atas UU Noomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A. ANGGOTA DPR RI:

PIMPINAN : HADIR 2 ORANG

PIMPINAN DARI 5 PIMPINAN

1. IR BAMBANG WURYANTO.,M.B.A/F-PDIP
(KETUA)
2. Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH.,M.M./F-PAN
(WAKIL KETUA)

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN: HADIR 6 ORANG ANGGOTA DARI
11 ANGGOTA:**

1. ICHSAN SOELISTIO

2. TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.
3. H. ARTERIA DAHLAN S.T., S.H., M.H.
4. I WAYAN SUDIRTA, S.H.
5. H.AGUSTIAR SABRAN, S.Kom
6. IRJEN POL (PURN) DRS.H.SAFARUDDIN

FRAKSI PARTAI GOLKAR: 3 ORANG ANGGOTA DARI 7 ANGGOTA:

1. Ir. Hj. SARI YULIATI., M.T.
2. H. RUDY MAS'UD., S.E., M.E
3. H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI., S.H., M.Kn.

FRAKSI PARTAI GERINDRA: 5 ORANG ANGGOTA DARI 7 ANGGOTA:

1. HABIBUROKHMAN., S.H., M.H.
2. ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, S.H., M.Hum.
3. MUHAMMAD RAHUL
4. OBON TABRONI
5. BIMANTORO WIYONO., S.H.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT: 3 ORANG ANGGOTA DARI 5 ANGGOTA:

1. EVA YULIANA, M.Si.
2. Y. JACKY ULI
3. ARY EGAHNI BEN BAHAT., S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA : 1 ORANG ANGGOTA DARI 5 ANGGOTA:

1. HERU WIDODO, S.Psi.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT: 3 ORANG ANGGOTA DARI 5 ANGGOTA:

1. DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS.
2. H.SANTOSO, S.H.
3. DR. BENNY KABUR HERMAN, S.H.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA: 2 ORANG ANGGOTA DARI 4 ANGGOTA:

1. H.M.NASIR DJAMIL, M.Si.
2. DRS. H. ADANG DARADJATUN

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL: 2 ORANG ANGGOTA DARI 3 ANGGOTA:

1. H. NAZARUDDIN DEK GAM
2. MULFACHRI HARAHAP., S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN: 1 ORANG ANGGOTA DARI 1 ANGGOTA:

1. H. ARSUL SANI., S.H., M.Si.

A. UNDANGAN:

- 1. Komjen Pol Dr. Drs. Petrus R Golose (Kepala BNN Republik Indonesia)**

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT /F- P. PAN (PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati Pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI yang berhadir baik secara fisik maupun secara *virtual*,
Yang saya hormati Kepala BNN, beserta
Seluruh jajaran,

Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena perkenannya jugalah saat ini kita pada hari ini dapat melaksanakan dan menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI secara fisik dan *virtual* dengan Badan Narkotika Nasional dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Berdasarkan laporan sekretariat telah hadir sebanyak 27 dari 53 orang anggota Komisi III dan 8 fraksi dari 9 fraksi. Oleh karena itu kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Ayat 1 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, maka perkenankan kami membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka apa tertutup, Pak? Terbuka?

(RAPAT:TERBUKA)

Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Kepala BNN beserta jajaran yang telah memenuhi undangan kami, begitu pula anggota Komisi III yang telah hadir secara fisik maupun secara *virtual*. Perkenankan kami menyampaikan rangkaian kegiatan rapat pada hari ini, pertama mendengarkan penjelasan Kepala BNN atas pertanyaan tertulis yang telah diberikan oleh Komisi III DPR RI, tanya jawab atau diskusi, kesimpulan dan terakhir adalah penutup. Kami ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat kita pada hari ini bisa kita iri pukul empat (16.00)? Kalau kurang nanti kita tambah.

(RAPAT:SETUJU)

Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 174 Ayat 1 dan Ayat 2 huruf B, serta Pasal 207 Ayat 1 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyebutkan

bahwa, DPR mempunyai fungsi pengawasan dan dapat dilakukan terhadap pelaksanaan keuangan negara, serta setiap anggota berhak mengawasi pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan APBN dan kebijakan pemerintah, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat. Mengingat pada Masa Sidang V yang akan datang sesuai siklus anggaran akan memasuki Pembahasan Pendahuluan Anggaran Belanja Tahun 2023, maka pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022. Ini Komisi III akan fokus pada pembahasan penerimaan negara bukan pajak dan penyelamatan keuangan negara dari masing-masing mitra kerja Komisi III.

Komisi III DPR RI mendapat penugasan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersama-sama dengan pemerintah. Sebelum melakukan pembahasan rancangan undang-undang dimaksud, Komisi III ingin mendengarkan berbagai pihak terutama dari BNN yang melaksanakan tugas negara di bidang pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif, apa saja yang harus diatur dalam rancangan undang-undang tersebut.

Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini Komisi III akan mendengarkan penjelasan dari Kepala BNN mengenai capaian PNBPN tahun 2021, target pencapaian PNBPN di tahun 2022 dan renstra program prioritas 2022, serta masukan substansi atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Narkotika. Kami persilakan Pak Kepala BNN.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Dr. PETRUS REINHARD GOLOSE):

Terima kasih, Pak.

Yang terhormat Pimpinan Komisi III DPR RI,
Anggota Komisi III DPR RI, dan
Hadirin sekalian,

Selamat siang,
Salam sehat dan bahagia tanpa narkotika,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat hadir pada rapat kerja bersama Pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI.

Sebagaimana undangan Wakil Ketua DPR RI tanggal 25 Maret 2022 perihal undangan rapat kerja dimana Komisi III DPR RI meminta penjelasan tentang capaian PNBPN tahun 2021 dan target PNBPN tahun 2022, strategi

optimalisasi penyelamatan keuangan negara dalam rangka peningkatan PNBPN, masukkan terhadap revisi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pimpinan Rapat, dan
Anggota Komisi III DPR yang saya hormati,

Sebelum saya sampaikan penjelasan terkait dengan capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di lingkungan BNN RI, saya sampaikan informasi bahwa ketentuan mengenai PNBPN BNN RI mengacu kepada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Narkotika Nasional, serta beberapa peraturan turunannya yang khusus mengatur mengenai PNBPN di lingkungan BNN RI.

Realisasi PNBPN dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 *trend*-nya mengalami kenaikan. Hal ini tergambar dari capaian realisasi tahun 2020 yang mencapai Rp5.210.020.000 atau 428,6% dari target Rp1.215.485.000, kemudian *trend* ini berlanjut pada tahun 2021 dengan realisasi sebesar Rp13.062.932.000 atau 138,6% dari target Rp9.421.210.000 dan diharapkan masih dapat ditingkatkan sampai dengan akhir tahun 2022. Karena sampai menjelang akhir Maret tahun 2022 sudah tercapai Rp4.321.269.000 atau 53,3% dari target awal Rp8.098.345.000, sedangkan masih terdapat 9 bulan sisa waktu pelaksanaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Narkotika Nasional dan surat Menteri Keuangan RI tentang Persetujuan Permohonan Penggunaan sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Narkotika Nasional sejak tahun 2020 BNN RI melaksanakan pemungutan dan pengelolaan PNBPN pada beberapa layanan yang terkait bidang rehabilitasi dan pemeriksaan narkotika di Laboratorium Narkotika BNN RI yang meliputi pada balai besar, balai loka rehabilitasi BNN, skrining narkoba calon peserta program peningkatan keterampilan layanan rehabilitasi narkoba dan penelitian berupa tes urine dengan menggunakan 7 parameter yaitu, Amphetamine, Opioid dan turunannya, THC untuk Cannabis dan turunannya, Metamfetamina, Kokain dan golongan Benzodiazepine, serta Karisoprodol.

Program peningkatan keterampilan layanan rehabilitasi narkoba dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi petugas pelayanan rehabilitasi narkoba yang dilaksanakan selama 5 hari. Penelitian di unit pelaksana teknis rehabilitasi berkaitan dengan metode dan pengembangan layanan rehabilitasi pendidikan sumber daya manusia yang tersedia di balai besar, balai dan loka rehabilitasi BNN, waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan paling lama 3 bulan.

Pada klinik BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota, PNBPN di lingkungan rehabilitasi dilaksanakan pada klinik BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota, surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba (SKHPN), meliputi pelaksanaan penertiban dan pelayanan pemeriksaan tes urine, pembuatan SKHPN

ditujukan bagi masyarakat umum yang membutuhkan surat keterangan tersebut berbagai kepentingan.

Layanan evaluasi pemeriksaan psikologis adiksi tipe A dan B bagi masyarakat umum di luar layanan rehabilitasi dilaksanakan pada Klinik BNN Provinsi. Evaluasi pemeriksaan psikologis kategori A meliputi layanan tes yang mengukur persepsi dan sikap, sementara pada evaluasi penggunaan psikologis kategori B meliputi layanan tes yang mengukur persepsi sikap gambaran kepribadian dan potensi intelegensi.

Pada Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI, uji kualitatif laboratorium sampel narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya, kecuali tembakau dan alkohol, *output* layanan berupa surat hasil pemeriksaan uji laboratorium. Praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba, pengguna layanan akan melaksanakan praktek kerja terkait metode pengujian narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI.

Output layanan berupa sertifikat penggunaan instrumen untuk keperluan analisis mencakup serangkaian proses penggunaan instrumen laboratorium untuk keperluan analisis sampel dari pengguna layanan, *output* layanan berupa data hasil analisis instrumen.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Jenis dan Layanan atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, Layanan Penerbitan Rekomendasi Importir dan Eksportir terdaftar Rekursor Narkotika non Farmasi yang berlaku pada Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Perindustrian.

BNN RI melaksanakan layanan penerbitan rekomendasi penunjukan importir terdaftar prekursor narkotika non farmasi, penerbitan Perpanjangan rekomendasi penunjukkan importir terdaftar prekursor narkotika dan non farmasi, penerbitan rekomendasi persetujuan impor prekursor narkotika non farmasi, penerbitan rekomendasi persetujuan ekspor prekursor narkotika non farmasi.

Pimpinan Rapat dan Anggota Komisi III DPR yang saya hormati,

PNBP merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam APBN disamping tentunya rupiah murni, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara PNBP terus dilakukan. Beberapa langkah strategis dilakukan oleh BNN RI dalam rangka untuk meningkatkan PNBP adalah sebagai berikut:

Peningkatan penyelenggaraan pelayanan PNBP dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ini BNN antara lain, telah melakukan perbaikan sarana prasarana penunjang layanan seperti sarana prasarana klinik yang ada di BNN Provinsi maupun BNN Kabupaten dalam rangka pemberian surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba (SKHPN). Disamping itu juga melalui unit layanan BNN RI juga telah membuat maklumat pelayanan sebagai upaya untuk melakukan transparansi prosedur penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.

Saat ini beberapa satker telah memperoleh penghargaan WBBM Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI, WBK BNN Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Balai Besar Rehabilitasi, Rehabilitasi Baddoka, Loka Rehabilitasi Batam, Loka Rehabilitasi Kalianda dan BNNK Sidoarjo.

Digitalisasi layanan PNBP; penyediaan BOSS (BNN *one stop services*) pada *website* BNN RI sebagai aplikasi penghubung berbagai aplikasi layanan yang ada di BNN seperti tes urine, layanan uji laboratorium dan layanan perijinan prekursor. Melalui aplikasi BOSS ini diharapkan masyarakat ketika akan mengakses layanan tersebut cukup dapat masuk melalui layanan BOSS. Melalui digitalisasi layanan ini juga diharapkan akan dapat mendorong adanya akuntabilitas manajemen pengelolaan PNBP. Pusat laboratorium narkotika BNN RI telah mulai layanan berbasis *website* sejak tahun 2015, kemudian berkembang menjadi layanan dalam genggam *real time* data dengan adanya inovasi sistem informasi laboratorium narkotika ini mendukung era digital melayani, selain mempercepat waktu pelayanan juga memangkas proses layanan laboratorium.

Perencanaan dan monev PNBP dalam rangka pengelolaan PNBP yang lebih baik, penentuan target PNBP didasarkan pada data capaian sehingga diharapkan penentuan target dapat lebih realistis. Di samping itu monev juga dilakukan secara berkala untuk melihat perkembangan pelaksanaan PNBP apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum, serta apabila ditemukan ada permasalahan akan dilakukan upaya perbaikan serta dicarikan solusinya.

Keempat, penguatan tata kelola dan pengawasan PNBP upaya untuk melakukan *update* informasi, serta pelatihan kepada bendahara penerimaan terus dilakukan disamping itu juga dilakukan pendampingan dan konsultasi dengan aktif Inspektorat Utama BNN RI kepada pengelola PNBP untuk meminimalisir adanya kesalahan dalam pengelolaan PNBP.

Kelima, optimalisasi pengelolaan aset dalam rangka untuk meningkatkan PNBP melalui optimalisasi penggunaan peralatan laboratorium narkotika dan penyewaan lahan untuk *minimarket* di balai besar rehabilitasi BNN RI.

Pimpinan Rapat dan Anggota Komisi III DPR yang saya hormati,

Terkait dengan proses pembahasan internal pemerintah terhadap revisi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN RI secara aktif dalam ikut dalam proses pembahasannya.

Beberapa masukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan penguatan kepada BNN RI sebagai berikut:

1. Penguatan fungsi rehabilitasi dengan memberikan kewenangan penetapan standarisasi pelaksanaan keamanan dan pengawasan Penyalah Guna, Korban dan/atau Pecandu di fasilitas layanan rehabilitasi, penyelenggaraan rehabilitasi meliputi persiapan, pelaksanaan dan pasca rehabilitasi, pelaksanaan rehabilitasi

- sukarela dilakukan asesmen oleh petugas rehabilitasi terlatih di institusi penerima wajib lapor (IPWL) yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun komponen masyarakat, pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum ditentukan oleh tim asesmen terpadu (TAT) dengan BNN RI sebagai *leading institution*;
2. Penguatan fungsi pelaksanaan TAT, di mana hasil TAT dengan rekomendasi rehabilitasi wajib dilaksanakan;
 3. Penguatan kewenangan BNN RI dalam penetapan *new psycho active substances* (NPS) yang belum terdaftar dan telah validasi laboratorium narkotika dalam rangka penegakan hukum.

Pimpinan Rapat dan Anggota Komisi III DPR RI yang saya hormati,

Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami, selanjutnya mohon Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat dapat memberikan dukungan kepada BNN RI sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan dapat menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam penanggulangan narkotika.

Hari Selasa pergi ke Senayan,
Menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI,
War on drugs bukan sekedar semboyan,
Melainkan semangat kerja BNN RI,

Indonesia negeri nan bahari,
Dengan kekayaan laut luar biasa,
Komisi III DPR RI mendukung BNN RI,
Gelorakan *war on drugs* ke penjuru bangsa.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Shalom,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Salam Indonesia bersinar *war on drugs speed up never let up.*

KETUA RAPAT:

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati,

Kita tadi telah mendengarkan paparan dan penjelasan dari Kepala BNN RI. Untuk itu kami persilakan kepada kawan-kawan untuk memberikan pendalaman. Dalam sesi tanya jawab ini kami melihat yang pertama hadir untuk mengikuti rapat dengan BNN ini adalah Pak Wayan Sudirta. Untuk itu kami persilakan Pak Wayan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendalaman.

Silakan, Pak Wayan.

F- PDIP (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

Kemarin saya nengok jadwal ke Komisi III habis Paripurna, tapi kalau dianggap saya hadir pertama ya terima kasih.

Pimpinan dan anggota yang saya hormati,
Pimpinan BNN beserta jajarannya yang saya hormati pula,

Paparannya sih bagus, sangat bagus, tapi waktu kami terbatas sehingga kami akan coba fokus pada penguatan fungsi rehabilitasi, Pak.

Dari sekian paparan yang penting-penting itu, kok saya merasa harus berani menyatakan penilaian bahwa ini paling strategis, Pak. Kenapa strategis, karena sekali lagi tanpa maksud mengulang-ulang tetapi memang penting digarisbawahi bahwa, bukankah narapidana narkoba yang memenuhi ruang-ruang LP data beragam, tapi rata-rata di atas 50% itu dihuni oleh narkoba. Kalau kita kerucutkan lagi Pak dari tindak pidana khusus, dari tindak pidana khusus ternyata 96% itu adalah narkoba, Pak. 96% dari seluruh tindak pidana khusus, artinya ini kita sudah tidak bisa menutup mata terhadap sesaknya LP karena narkoba.

Pertanyaannya sekarang, mari kita tengok undang-undangnya, apa sih syarat-syarat yang membuat kita sulit melakukan rehabilitasi, apa? Kalau kita bicara undang-undang. Kalau kita bicara surat edaran ada, ada surat edaran Mahkamah Agung tahun 2010 dan 2011 nomor 3 dan 4 ada, tapi apakah kita betul harus tunduk pada surat edaran itu, sedangkan kepolisian punya Undang-Undang Kepolisian sendiri Pak, sementara Mahkamah Agung hanya bikin surat edaran. Tentang narkoba udah ada undang-undangnya, tidak ada syarat sekecil apapun yang saya jumpai jika kemarin mencoba mempelajari ulang tentang revisi Undang-Undang Narkoba itu, tidak secuilpun diberikan persyaratan, itu artinya apa? Bapak ini punya kewenangan luar biasa Pak, untuk menentukan seseorang dapat direhabilitasi atau tidak, Bapak yang punya Pak. Apalagi untuk rehabilitasi yang tidak berlanjut pada Kejaksaan dan pengadilan, itu Mahkamah Agung tidak bisa menyentuh kewenangan Bapak, Pak. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan bersama kapan rehabilitasi ini berjaya dalam program penanganan narkoba, Kapan? Itu kerinduan saya, Pak. Skripsi saya S1 di tahun 74 itu udah bicara tentang narkoba, yang terjadi sekarang ini nggak meleset Pak, karena kita pernah punya sejarah tentang pecandu, sangat berbahaya, Pak. Oleh karena itu pastikan, kalau saya boleh menggunakan hak saya sebagai anggota Komisi III, berikan rehabilitasi semuanya tanpa persyaratan apapun asal dia pengguna, asal dia pengguna. Kalau pengedar, kalau cukong ya, kalau perlu dihukum mati sekalian, jadi ekstrim pandangan saya, Pak. Karena berdasarkan hasil penelitian saya di waktu dulu. Kalau pengguna jangan dimasukkan ke LP dia menjadi tambah menjadi penjahat, Pak. Pengguna bawa ke rehabilitasi. Mohon maaf karena sekali lagi bidang saya ini.

Pak, apakah menjadi berat anggarannya? Yuk kita berdiskusi tentang anggaran. Perkiraan saya 1,8 triliun itu kalau kita bicara bagaimana banyaknya narapidana habis untuk itu 1,8 triliun dari anggaran sekitar 3 triliun LP. 1,8 triliun

saya pernah oret-oret berdasarkan asal hasil penelitian pengamatan. Lah kalau itu dibawa ke rehabilitasi, bukan main fasilitas yang akan kita siapkan. Belum lagi kalau beberapa rumah sakit sekarang sedang bersemangat, Pak. Semangat apa, melakukan rehabilitasi dengan biaya mandiri, Pak. Lah kenapa kita ragu-ragu membuat program yang ekstrim untuk rehabilitasi Pak, dan akan terus akan saya gugat BNN siapa saja, setiap ada rapat-rapat dengar pendapat seperti ini.

Kalau hasil rehabilitasi itu belum memuaskan, akan saya gugat berdasarkan hak asas sebagai anggota, Pak. Karena penelitian kami menjadi sia-sia kalau begini caranya, Pak. Untuk apa ada penelitian, kalau implementasinya nggak ada. Itu kan sama dengan bicara nilai-nilai Pancasila, tiap hari kita hafal tapi di lapangan itu ndak pernah kita wujudkan. Untuk apa sih penelitian, untuk apa itu ya proses keilmuan itu kok tidak diwujudkan, saya titip diri Pak, karena dia masih muda kita tidak bisa dipenjarakan terus-menerus tapi direhabilitasi, diobati.

Pak Kepala, kenapa musti orang yang kena narkoba nggak boleh direhabilitasi di rumah sakit, padahal orang yang flu saja boleh opname di rumah sakit, orang yang kena narkoba yang butuh perhatian lalu dibiarkan dipenjarakan. Tidak ada penelitian yang mengatakan ketika dia dipenjara dia bertambah baik, tapi ketika direhabilitasi sekecil apapun kita optimis apalagi rehabilitasi yang kita lakukan ini tidak semata-mata masuk rumah sakit, Pak. Bisa berobat jalan kan Pak, kalau begitu apa hambatannya.

Saya hanya melihat hambatannya 2 hal Pak; 1 surat edaran Mahkamah Agung, abaikan saja itu, itu berguna karena proses pengadilan baru akan ditaati Hakim, tapi kalau di kepolisian janganlah terikat, Pak. Bukan kita ndak hormat pada Mahkamah Agungnya, tapi kalau surat edaran surat edaran memenuhi meja-meja penegak hukum, surat edaran Mahkamah Agung untuk apa ada undang-undang, untuk apa Undang-Undang Kepolisian yang memberikan kewenangan itu, Pak.

Agak panjang Pak. Saya masukkan agar betul-betul sekian persen dari semangat kami ini ditangkap, lakukan rehabilitasi sebanyak-banyaknya. Jangan penjarakan lagi pengguna. Ada pertanyaan begini Pak, lalu kalau begitu kalau dia sekian gram, sekian gram, sekian gram masa itu harus direhabilitasi, kalau menurut saya tinggal membedakan dia pengguna atau pengedar atau cukong, ya kalau pengguna ya rehabilitasi, kalau bukan pengguna ya pengedar, kalau pengedar ya hukum sekeras-kerasnya, Pak. Karena pengguna itu korban, yang jahat adalah cukong dan pengedar.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik. Selanjutnya kami persilakan Bapak Heru Widodo.

F- PKB (HERU WIDODO, S.Psi.):

Makasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yang saya hormati Pimpinan, dan
Seluruh Anggota Komisi III yang hadir baik secara fisik maupun *virtual*,
Yang saya hormati Kepala BNN Pak Petrus, beserta seluruh jajarannya,

Yang pertama saya ingin menyampaikan apresiasi atas kinerja yang sudah dicapai oleh BNN. Ini tahun 2021 target penerimaan PNBP sudah melampaui target, bahkan ini lebih 1 sampai pada titik 1, 138,6% dari total target 94% capaiannya 3, dari total 9,4 miliar total capaiannya 13 miliar. Nah, kemudian pada tahun 2022 ini capaiannya sudah sampai 53,3%. Saya kira ini harus terus ditingkatkan mengingat negara kita dalam kondisi keuangan yang yang kurang baik, saya kira ini menjadi masukan bagi negara kita.

Kemudian yang kedua, saya ingin menyoroati soal sumber dari PNBP yang diperoleh dari BNN. Ini di berdasarkan dari hasil Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 yang salah satunya adalah SKHPN. SKHPN ini adalah surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika. Ini saya melihat besarnya sangat tinggi sekali Pak, kalau ini kemudian kita asumsikan pada masyarakat umum ini sangat tinggi sekali di daerah itu sampai 290.000 kalau tidak salah. Nah, saya kira ini menjadi beban tersendiri bagi masyarakat kita ketika mereka misalnya ingin mengetahui apakah mereka ada kandungan ketika narkotika psikotropikanya, ini menjadi sangat beban sekali, Pak. Saya kira ini perlu dikaji ulang apakah ini harus diturunkan atau bagaimana karena biar bagaimanapun ini pasti akan menjadi beban bagi masyarakat kita.

Kemudian yang ketiga ini terkait dengan tadi barusan saya coba cek website dari BOSS, ini ternyata bagus sekali. Jadi ada beberapa fitur yang kemudian ini sudah bekerja dengan baik dan berkoneksi, tapi sayang sekali ini hanya sebatas baru sebatas informatif saja, kayak misalkan, disitu ada misalkan kita mau cek laboratorium ternyata hanya kita diberikan informasi tempat-tempatnya saja, tapi kemudian tidak bisa kemudian kita melakukan pendaftaran secara *online* dan lain sebagainya. Nah saya harap *website* ini perlu dikembangkan Pak karena ini sangat penting, apalagi dalam kondisi kita sekarang Covid ini orang pasti akan menghindari kerumunan, orang pasti akan menghindari transaksi, melakukan administrasi secara langsung, nah ini mohon dipertimbangkan.

Lalu kemudian yang keempat, ini terkait dengan jenis PNBP dari BNN, ini saya kira perlu ditekankan, ini terkait dengan misalnya Dirjen (Direktorat Intelijen) Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI, ini terkait dengan penerbitan rekomendasi penunjukan importir terdaftar prekursor narkotika non farmasi. Saya kira justru ini yang harus digenjot, Pak. Jadi misalnya ada beberapa farmasi yang kemudian minta izin untuk mengeksport atau impor barang psikotropika maka tarifnya harus di apa namanya di pertegas. Saya kira ini menjadi apa masukan yang penting juga untuk nanti meningkatkan PNBP kita.

Kemudian selanjutnya ini terkait dengan masukan revisi Undang-Undang Narkotika. Saya kira ini bisa menjadi pertimbangan kita Pak Ketua ketika nanti apa namanya kita membahas soal revisi Undang-Undang Narkotika ini, terutama ini dalam hal penguatan fungsi rehabilitasi, lalu kemudian penguatan fungsi asesmen terpadu dan muatan kewenangan BNN RI dalam penerapan NPS.

Saya kira itu, Pak Ketua. Semoga ini menjadi masukan bagi kita bersama dalam hal memperkuat kinerja BNN kita dalam rangka memerangi narkoba.

Terima kasih.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilakan Bapak Trimedy Panjaitan.

F- PDIP (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Saya pikir saya nomor satu bertanya karena perasaan saya pada saat saya masuk ke ruangan rapat saya hanya dengan Pak Ketua Komisi ada disini, ternyata Pak Wayan, Pak Heru, udah duluan tanda tangan berarti triknya adalah seperti itu ya.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita sekalian,*

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi III,
Saudara Kepala BNN beserta jajarannya,

Yang pertama saudara Kepala BNN, saya sih sebelum masuk soal PNBPN mau menanyakan kepada saudara Kepala BNN, apakah BNN ini masih perlu kita pertahankan apa enggak? Karena kan BNN ini lahir dari Undang-Undang 35 2009, sekarang 2012 eh sorry, 2022 berarti kurang lebih berapa, 13 tahun BNN ini. Apa evaluasinya? Saya tau ini bukan rapat kerja, tapi dalam kesempatan ini saya ingin menggunakan itu juga karena sebentar lagi DPR akan revisi Undang-Undang Narkotika. Karena eksistensi BNN ini dari Undang-Undang 35 tentang Narkotika.

Kenapa saya sampaikan seperti itu, karena saya lihat juga pemerintah tidak terlalu serius mendukung BNN ini. Saya mau tanyakan saudara Kepala BNN, setahun berapa kali ketemu presiden? Apakah hari narkoba aja ketemu presiden? Sebelum menentukan jadwal acaranya kemudian ketemu di tempat acara atau ada keinginan yang tinggi dari Presiden Jokowi untuk perang terhadap narkoba yang selalu beliau sampaikan. Kalau perang terhadap narkoba tapi anggarannya 1,8 T, ya itu lebih parah dari bambu runcing. Yang

kita hadapi bandar-bandar gila-gilaan itu. Nah itu juga perlu kita renungkan, karena kalau BNN dipertahankan menurut saudara kepala BNN berapa nih anggaran yang *ideal* BNN? Sehingga bisa menurunkan. Karena ini kan kita khawatir nih yang punya anak remaja sampai dewasa ya tiap hari kita jaga kita awasi mereka hati-hati berteman, kalau ada temennya yang kira-kira keringatan terus hati-hati, kalau dalam bahasa hukum patut diduga gak ngapa-ngapain keringatan. Itukan patut diduga. Nah itu seperti apa, karena tidak ada dukungan di atas, tidak ada dukungan di tengah, tidak ada dukungan di bawah.

Dalam setiap kunjungan kerja reses Komisi III, ketemu Kepala BNN Provinsi cerita sedih semua, Pak Petrus. Yang paling dahsyat misalnya mereka selalu bilang tidak ada, padahal P4GN itu kan Ketuanya Gubernur ya katanya, tapi nggak ada di Kabupaten/Kota bupati atau walikota, enggak datang atensi mereka. Tetapi saya bilang setiap kunjungan ke daerah keluhan seperti itu dari Kepala BNNP ya bagaimana mau ada perhatian wong dari pusat juga nggak ada perhatian, ya terima aja nasib. Sampai saya bilang terutama yang berasal dari kepolisian, ya yang penting kalian dapat naik pangkat deh BNN, yang susah pecah telur jadi Brigjen di BNN, yang susah dapat bintang 1 dapat bintang eh bintang 2 dapat bintang 2-nya di BNN, kan jangan begitu Pak.

Jadi saya mengusulkan kepada Ketua, Wakil Ketua dan kita anggota Komisi III ini dalam rangka revisi Undang-Undang 35 soal narkoba, kita juga harus semangat bukan soal rehabilitasi saja menurut saya, tapi eksistensi BNN ini. Kalau kita mau perkuat BNN ya anggarannya juga harus kita perkuat jelas dan kewenangannya juga diperkuat. Kan BNN ini udah luar biasa ini kewenangannya menyadap, menyelidik, sidik, luar biasa nih. Jadi itu yang pertama saudara Kepala BNN, perlu kita renungkan dan perlu kita perhatikan.

Kedua, saya ini melihat ada Keppres Peraturan Pemerintah Nomor 19, tadi udah sampaikan Pak Heru. Saya lihat juga di sini dalam laporan saudara Kepala ini ada juga jenis PNBP ada balai besar, balai loka segala macam, ada klinik, kemudian ada pusat laboratorium, nah angka 13 miliar ini dari mana? Saudara Kepala BNN? Apakah termasuk dari yang saya bacakan tadi atau sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Heru tadi apa namanya tuh SHKPN itu benar saudara Kepala BNN, keluhan dari masyarakat di bawah dan itu 290.000 itu terlalu tinggi, tolong disampaikan juga kalau ketemu Pak Presiden, karena ini SK-nya yang tanda tangan Pak Presiden Pak Joko Widodo sahabatnya Pak Bambang Pacul yang tanda tangan ini.

Nah, kalau memang ini keberatan, tolong sampaikan kepada Presiden "Pak Presiden, ini rakyat Pak Presiden keberatan nih 290.000." Kemarin kita bicara dengan apa ya dan Baintelkam, SKCK kita malah minta digratiskan. Nah, ini juga harus seperti itu. Tolong sampaikanlah dan ini tolong dirinci ke depan ini 13 M ini dari mana? biar kita tau berapa persen dari apa, apa namanya itu tadi SHKPN itu, berapa persen yang dari segala macam ini, klinik BNN segala macam ini, dan bagaimana nasib barang bukti? Nah barang bukti itu kita yakinlah pasti dimusnahkan, dan ini memang bukan forumnya untuk menyampaikan itu. Nah, barang bukti itu bagaimana. Karena ya banyak rumor juga soal barang bukti ini. Salah satu penyebab narkoba tidak bisa diberantas di Indonesia bukan hanya pemasoknya yang canggih-canggih dari luar, yang

barang buktinya itu berpindah-pindah tangan aja. Kan banyak kecurigaan bahwa ya dibakar tapi yang dibakar itu 20% lah sabu yang asli, yang lainnya *wallahualam* yang dibakar. Nah ini seperti apa, saudara Kepala BNN. Kita mau, mau memahami, mau mengetahui itu supaya jelas, apa posisi BNN ini ke depan ini. Kalau saya berpandangan kalau kita memperkuat BNN, BNN-nya *full* kita perkuat TNI Polri udah tidak ada lagi di narkoba, udah tidak ada lagi di Mabes Direktur Narkoba. Kalau memang tidak ya BNN-nya kita inikan.

Mungkin itu dulu saudara Pimpinan yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi tetap semangat, kalau bisa ada pertemuan berkala dan mohon arahan dari Pak Presiden kira-kira apa menurut beliau, terobosan-terobosan yang perlu dilakukan, sehingga dalam setiap pertemuan Presiden akan arahkan di Bali tuh ketemu Gubernur, Bupati ya kemarin itu minggu lalu, ya disampaikanlah kepada para Kepala Daerah itu, bantulah BNP, BNK, BNProv apa Kabupaten.

Terima kasih.

*Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Baik. Selanjutnya kami persilakan Bapak Haji Adang Daradjatun.

F- PKS (Drs. H. ADANG DARADJATUN):

Terima kasih.

Pimpinan dan teman-teman anggota Komisi III,
Kepala BNN dan seluruh jajaran,

Ada tiga hal yang akan saya dalami, satu masalah yang berhubungan PNBPN, kedua undang-undang dan ketiga lebih bersifat titipan agak keluar sedikit tapi hampir sama dengan rekan saya terdahulu.

Tolong KBNN, terima kasih penjelasan realisasi PNBPN sampai dengan Maret 2022, tapi untuk dimaklumi bahwa sesuai arahan Ketua Komisi kita, rapat-rapat saat ini ada, ada hubungannya dengan kesiapan apa, APBN nanti 2023 gitu ya. Nah jadi seperti lembaga atau mitra kerja kita terdahulu, itu secara rinci PNBPN itu dijelaskan. Jadi mohon Ketua, Pimpinan, mungkin bisa disusulkan kemudian hal-hal yang lebih rinci seperti kemarin pada saat kita bertemu dengan Kakorlantas dan Kabik, jadi kita jelas, kita bagaimana nanti pertanyaan dari Bang Trimedya apakah tentang masalah anggaran dan sebagainya kita dukung dan sebagainya, karena semangat kita sama lah bahwa kita ingin BNN ini lebih kuat, lebih mampu mengatasi permasalahan. Jadi saya titip saja tolong realisasi ini bisa diperjelas walaupun cukup disusulkan kemudian seperti kemarin Korlantas dan BIK yang secara rinci sekali menjelaskan pendapatan tersebut sehingga kita tau mana-mana yang harus dibantu, itu yang pertama tentang PNBPN.

Yang kedua masalah yang berhubungan dengan RUU.

Saya ingin saja menarik disini di halaman tertentu dinyatakan bahwa pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum ditentukan oleh tim asesmen terpadu (TAT) nah ini yang saya garisbawahi dengan BNN RI sebagai *leading institution*. Nah saya mohon penjelasan lebih dalam tentang *leading institution* ini, karena terus terang saja, kita terbuka saja bahwa TAT ini terus terang saja mempunyai kewenangan yang cukup besar, gitu ya. Apakah dia akan berproses lanjut atau udah direhab jadi kita berkeinginan juga di RUU yang baru karena kalau kita lihat di RUU yang baru dia ditempatkan kemungkinan ya akan ada di PP, sedangkan ini merupakan lembaga yang betul-betul sangat menentukan, apakah dia akan ditaruh di norma, di pasal atau apapun juga namanya, tapi saya merasa bahwa ini TAT betul-betul memiliki fungsi yang sangat penting untuk menentukan seperti dari teman-teman saya yang bertanya, apakah akan direhab atau proses ditahan dan selanjutnya. Jadi kedudukan TAT di dalam RUU yang datang lebih jelas lagi, karena apapun juga TAT ini ya maaf ya di lapangan bisa menjadi moral *hazard* kalau kita tidak mengadakan pengawasan yang baik.

Lalu ini agak di luar sedikit, saya seperti Pak Tri tadi, Trimedya ya, saya sudah catat jadi saya tidak dalam konteks mengikuti apa yang disampaikan beliau tapi maksud saya dalam hati saya juga sama. Jadi tolong kalau kita lihat jumlah narkotik yang di tangkap, lalu jumlahnya ton-ton dan sebagainya tapi apakah mungkin ini media yang kurang memberikan suatu penjelasan, tapi minimal mungkin sore hari ini kami diberikan gambaran umumnya saja bahwa dugaan-dugaan tersebut tidak mungkin karena blablablabla gitu, jadi mungkin bisa dijelaskan oleh Ketua BNN. Itu saja dari saya.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, selanjutnya kami persilakan Dr. Hinca Pandjaitan XIII, silakan.

F- P. DEMOKRAT (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):

Makasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan anggota Komisi III,
Kepala BNN dan seluruh jajaran yang sangat saya hormati,

Saya mulai dengan salamnya Pak Petrus tapi saya buat kepanjangannya. Salam Indonesia bersih anti bahaya laten narkoba ketimbang Indonesia bersih bersinar. Saya pahami pelan itu apa sih Indonesia bersinar ini, ga nangkep saya tapi kalau di panjangin dia bersih narkoba *clear* dia. Tambah aja lagi bersih dan bahaya laten narkoba jelas BNN-nya, sehingga pertanyaan Bang Trimed bisa dipahami. Saya tetap pada posisi memulai ini dengan BNN bubar atau sangar tadi itu dan saya memilih sangar karena itulah kita bahas hari ini.

Hari ini membahas rapat bukan rapat kerja tapi RDP tentang PNBP kita dalam kaitannya nanti anggaran kita ke depan. Kebetulan juga bulan ini membahas revisi Undang-Undang Narkotika nyambung tadi penjelasannya.

Nah dari situ kita ingin tau, saya sepakat tadi dengan teman-teman detailnya, potretnya ini. Misalnya tentang PNBP tadi yang tahun 2022 disebutkan sedemikian rupa, kita mau ini dirinci Pak, biar tau kita sedang berdiri di atas batu keras atau lumpur hidup ini, betul-betul supaya kita tau seperti apa. Saya ambil contoh misalnya TPPU, TPPU yang tahun lalu kita bicarakan 2021 14 kasus, 16 tersangka, 108,3 miliar, diselamatkan uang tunai 2,2 miliar, uang di rekening 7,1 miliar, aset bergerak 8,5, tidak bergerak 89,7, barang berharga 646.000.000, kira-kira dari TPPU ini yang bisa agak besar ini dapatnya.

Nah kami belum pernah mendengarkan secara utuh tuntas TPPU ini ke mana? atau dimana saja, ambilnya kemana, yang mana. Kalau kita lihat peta sebaran yang ditampilkan, terima kasih karena ditanyakan waktu itu, peta rawan narkoba tadi *clear* itu termasuk jaringan-jaringannya. Saya sedih sekali memang karena Sumatera Utara yang paling tertinggi. Dari 87, 8.743 menjadi 8.691 kawasan rawan narkoba kategori waspada dan bahaya ini yang kemarin kita minta, Bapak telah jawab Sumut itu masuk 1.192, itulah sebabnya kemarin kita sebut juga di sana beli narkoba narkoba itu 4 M istilah kita itu (murah, meriah, menyenggol, mewah) di mana saja ada itu, Pak. Di Tanjungbalai, di Asahan, di daerah apa itu pesisir Selat Malaka itu.

Nah oleh karena itu, dengan gambaran seperti ini kita akan tau berapa sebenarnya, sehingga anggaran APBN kita untuk BNN 1,8 triliun menghasilkan PNBP-nya sekitar 13 miliar 2021 ngimbang ga ini gitu. Bahkan kita menyumbang beban negara karena penggunaan narkoba di Lapas *over*, yang oleh Komisi III bayar uang makannya itu 4 sampai 5 triliun, Pak. Jadi sukses sini BNN, polisi, Jaksa dan hakim mengirimkannya ke sana, tapi bebannya negara lagi kita ngomonginnya APBN ini, Pak.

Oleh karena itu, bagaimana kita membuat peta ini. Menurut saya data ini harus diperjelas lagi rinci saja Pak supaya kita tau nanti, berapa sebenarnya yang kita butuhkan apalagi nanti kita evaluasi BNN itu. Kalau saya tetap sangar dia. Mungkin bukan 1,8 jadi 18.000.000.000.000 mungkin, supaya bisa betul-betul yang kita target yang kita inginkan itu.

Misalnya tadi Pak Adang sudah sampaikan tim asesmen terpadu, setelah saya lihat data yang dipaparkan hanya berhasil 3.230 saja. Kalau cuman segitu bagaimana ini itu, Pak. Jadi padahal barangkali juga kalau itu pengguna, pengguna itu kan sakit orang sakit ya diobati bukan dipenjara gitu itu satu.

Kemudian tentang strategi peningkatan PNBP; Ada 5 strateginya, mulai peningkatan penyelenggaraan layanan PNBP, digitalisasi, perencanaan dan monev PNBP, penggunaan tata kelola dan pengawasan PNBP sampai optimalisasi pengelolaan aset. Apakah yang 5 ini saja bisa dan ini berapa targetnya, berapa dapatnya ini dan untuk itu membutuhkan berapa anggaran kita agar itu maksimal. Kalau saya sepakat dengan teman-teman tadi kalau Pak Heru dan Bang Trimed terlalu mahal, kalau saya minta itu digratiskan, Pak. Ini

untuk rakyat Pak, ini kan untuk kesehatan kita, biarlah APBN bayar itu, jangan diambil dari, Pak. Sudah dia korbannya, sudah masyarakat yang harus kita lindungi, suruh bayar lagi, nggak mau dia. Nah karena itu, apakah strategi untuk peningkatan PNBP ini dengan 5 ini saja apa ada trobosan baru.

Nah oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa, khusus di Sumatera Utara tadi angka-angka yang begitu besar itu menjadi terlalu kecil pendapatan kita. Nah, karena disangkutkan juga dengan revisi Undang-Undang Narkotika tadi tentu saya berada dalam posisi membuat dia sangar. Saya pun sepakat lah kalau Bang Trimed sudah ngomong komitmen Presiden Jokowi. Saya ingat betul tahun pertama beliau pidato, Indonesia dalam posisi darurat narkoba *clear* itu, tapi kebawahnya enggak pernah lagi dengarnya darurat, upacaranya saja di hotel berbintang. Daripada bayar hotel berbintang hari anti narkotik, lebih bagus turun ke bawah menyelamatkan anak-anak bangsa itu kan begitu, Pak. Jadi tidak perlulah festivalisasi penghargaan kepada si A, si B, si C begitu, faktanya *over capacity* di Lapas pengguna narkoba itu melebihi *budget* kita untuk itu.

Karena itu Komisi III lewat Pimpinan yang bijaksana ini kita ingin mendudukan berapa lah anggaran kita nanti 2023 untuk BNN ini. Karena itu Pak Petrus saya mohon ayo Pak kita bedah saja, kita ini sebenarnya dalam posisi berapa ini, kalau 1-10 apakah masih cuman 3, 4 atau sudah 9. Misalkan kita contoh kemarin itu target rehabilitasi.

Nah khusus untuk perubahan Undang-Undang Narkotika, saya ingin teman-teman BNN menceritakan pengalaman selama ini apa tantangan apa hambatannya agar bisa kita ubah formatnya. Misalnya karena lampirannya itu pakai 0,0 koma itu gramnya lalu ada tabelnya, padahal kalau 0,1 gram gitu harganya mungkin gak nyampe 1.000.000 mungkin 100.000 lalu kita hukum di 4 tahun, loh biaya dia 4 tahun itu kali 26.000 perhari sekian Pak nggak masuk akal ini sudah padahal dia harusnya direhab. Tapi begitu bandar jaringan yang tadi Bapak presentasi tidak ada disini tapi di yang dikirimkan kepada kita jaringan itu kita mau BNN itu berada di ujung paling depan untuk mengejar para bandar itu.

Terakhir untuk tentang prekursor ini, Pak. Jarang kita angkat, tapi ini kali ini saya ingin mengangkat ini betul-betul mohon diberi datanya, Pak. Ada berapa perusahaan farmasi, ada berapa perusahaan non farmasi yang mengimpor dan mengelola barang prekursor ini. saya kuatir sekali kenapa sampai ketangkap ton-tonan ini dan tadi Bung Trimed menyampaikan dan saya setuju ini barang ini pindah tangan saja, pindah tangan saja padahal kewenangan penuh teman-teman BNN dalam rangka penyidikan dengan konsep *underbuying* yang menyelamar itu, itu luar biasa Pak, cuman Bapak yang punya itu. Menyamar itu meskipun di lapangan menjadi *royal* itu nyamar, kan nggak mungkin nyamar pura-pura mabuk juga, kan enggak nyamar itu namanya dan seterusnya. Jadi *underbuying* itu menurut saya *big power* untuk Bapak mengejar bandar-bandar atau sumbernya itu.

Nah terakhir, Pimpinan. Saya ingin sekali lagi permintaan saya adalah mungkin karena ini rapat pertama kita tentang angka-angka belum siap betul

ini, saya mohon seperti kita kemarin juga karena ini RDP kita untuk agar kita bisa pastikan APBN untuk teman-teman BNN, nanti di bagian penutup kesimpulannya adalah memberi data lebih detail *at least* 2 atau 5 tahun kebelakang agar kita lihat berapa sebenarnya, dari situ kita buat rancangan berapa capaian target.

Misal Pak, 2020 targetnya cuman 1,2 M, Bapak sukses 428% 5,2 M, suksesnya kah itu atau targetnya terlalu kecil kan itu pertanyaannya. Sama dengann 2021, karena 5,2 M tahun 2020 targetnya dinaikin 9,4 M, realisasinya 13 M, targetnya tercapai. Jangan-jangan pun masih terlalu kecil dibandingkan ini. Lalu kemudian 2022 8 M, kenapa turun, Pak? 2021 9,4 kenapa ini turun. Maret sudah tercapai 4,3 mungkin nanti bulan Juli udah tercapai ini. Kalau lihat angka-angka itu seolah-olah dia berhasil Pak, tapi barangkali kita belum optimal dengan 5 strategi tadi. Ini pikiran saya, Pimpinan.

Terima kasih, tapi tetap semangat kita dukung BNN yang sangar.

Salam Indonesia bersih dari bahaya laten narkoba.

KETUA RAPAT:

Baik, selanjutnya kami persilakan Pak Ichsan Soelistio.

F- PDIP (ICHSAN SOELISTIO):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pimpinan Komisi III,
Rekan-rekan Komisi III,
Pak Kepala BNN beserta jajaran yang saya hormati,

Karena ini persoalan PNBP, saya hanya singkat, Pak Kepala. Ini kan dalam PNBP Bapak malah pakai Keppres, Pak. Biasanya PNBP itu cukup Menteri Keuangan Pak, tapi Bapak punya Keppres saya kebetulan memegang lampirannya. Jadi ada, ada harga-harganya yang ditandatangani oleh Pak Presiden sampai penelitian apa balai besar, balai dan loka rehabilitasi untuk penelitiannya mahasiswa D3, S1, S2, S3 dan umum dan luar negeri yang nilainya kalau umum dan luar negeri itu 3 jutaan.

Nah pertanyaannya sebetulnya dengan adanya kekuatan ini mustinya PNBP Bapak kuat gitu, tapi persoalannya pertanyaan saya siapa sih biasanya yang mau datang gitu Pak, karena disini kaya pusat laboratorium narkotika, uji kualitatif laboratorium sampel narkotika, psiktropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali tembakau dan alcohol, ini ada uji sampel berupa kristal, per sampelnya 435.000. Saya engga mau masuk di detail Pak apa itu barangnya dan segala macam, tapi ini ada cukup banyak, Pak. Saya ga sempet hitung mungkin 20-an 30-an titik, 30-an titik *income* atau PNBP ada di tempat Bapak.

Nah, kalau Bapak, tadi saya, untuk 2022 itu 8 miliar ya, Pak. Nah sebetulnya dengan, dengan 30 titik ini apakah tidak bisa ditingkatkan lagi Pak, karena realisasi 21 itu 13 miliar gitu. Jadi apa namanya oke kita ga mau menyamakan Bapak dengan Korlantas yang mempunyai 12 titik tapi berapa besar sekali, tapi ini kan Bapak 2021 menurut laporan Bapak ini 13 miliar. Jadi kami tentunya karena ini di PNBP mengharapkan adanya peningkatan dari 8 miliar ini umpamanya, karena ini kan kita mau coba konsolidasi menerima masukan-masukan ini sehingga bisa kita konsolidasikan untuk dalam rapat anggaran nanti, siklus anggaran kita masuk.

Yang kedua, Pak. Dalam revisi Undang-Undang Narkoba yang akan, yang kita akan bahas ini itu kalau melihat undang-undangnya itu kayaknya tidak ada penguatan apa ataupun apa terhadap pemberantasan narkoba ini karena hanya kalau mau dijalankan sebetulnya nggak usah direvisi, tapi kalau kita mau meningkatkan, artinya kalau udah ditetapkan oleh Presiden bahwa darurat narkoba artinya kita harus melakukan suatu terobosan terhadap RUU Narkoba ini Pak, mumpung Undang-Undang Narkoba-nya mau direvisi.

Nah itulah yang saya ingin harapkan terobosan apa yang diharapkan, karena supaya jangan terjadi tumpang tindih dengan apa namanya Direktorat apa, Direktorat Narkoba. Kita punya preseden antara KPK dengan Bareskrim, KPK, Bareskrim, Kejaksaan Agung untuk korupsi semua jalan *fine-fine* saja Pak memang dibuat aturannya dibuat undang-undangnya. Jadi mungkin terobosan itu yang harus kita pikirkan dalam rencana Rancangan Undang-Undang Narkoba yang akan datang ini.

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilakan Mulfachri Harahap

Silakan.

F- PAN (MULFACHRI HARAHAHAP, S.H., M.H.):

Terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh,*

Kepala BNN dan apa namanya jajaran,

Saya kira saya singkat saja, saya ingin menguatkan apa yang disampaikan oleh tadi Pak Trimedya, kemudian Pak Adang soal keberadaan BNN. BNN seperti ada dan tiada ini loh. Kalau, kalau di pusat mungkin apa namanya ya masih lumayan lah, tapi kalau kita 1 *level* terbawah di tingkat

provinsi maka kita dapati adalah cerita sedih seperti yang disampaikan saudara Tri tadi. Jadi sekalipun rapat sore hari ini bicara soal PNBP dan saya berpandangan bahwa agak kurang relevan ini ya, karena yang dilaporkan hanya 9 miliar, jauh dibandingkan kebutuhan BNN yang sesungguhnya.

Saya kira memang kita dihadapkan pada situasi yang, yang dilematis. Satu sisi kita tahu bahwa kejahatan narkoba dari waktu ke waktu semakin meningkat, apa yang ada di, di apa namanya berita itu hanya gunung es aja, sedikit dari apa yang sesungguhnya terjadi di, di *level* bawah.

Jadi dulu atau beberapa waktu yang lalu kita lihat pemerintah dengan gagah itu, menyampaikan kampanye perang melawan narkoba, tapi ternyata tidak diikuti dengan sejumlah kebijakan yang memperkuat kampanye itu dalam soal anggaran misalnya. Saya pernah kunjung ke Lido sana, berapa tahun yang lalu kunjungan kerja begitu, kemudian saya menyampaikan situasi yang kurang lebih sama, statementnya kurang lebih sama dengan apa yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini bahwa memang tidak ada kesungguhan dari, dari semua kitakatakanlah seperti itu saya tidak ingin menyebut individu atau satu per satu gitu, tapi kita secara kolektif bersalah terhadap kondisi yang dihadapi kita hari ini terkait dengan soal narkoba.

Soal dukungan anggaran tadi disampaikan oleh saudara Tri dengan 1,8 triliun apa yang bisa dilakukan BNN berhadapan dengan bandar narkoba yang mengontrol begitu besar jaringan dan tentu di dalamnya ada juga sejumlah apa namanya materi yang, yang, yang luar biasa yang dengan itu mereka bisa mempengaruhi aparat penegak hukum di, di semua *level*. 1,8 triliun saya kira sebuah angka yang jauh dari cukup untuk, untuk mengkampanyekan perang melawan narkoba di negeri yang luasnya luar biasa Sabang sampai Merauke.

Dulu, saya kebetulan lahir di Jakarta, jadi mengikuti secara langsung bagaimana perkembangan dari waktu ke waktu soal narkoba. Ini dulu soal narkoba nih kalau kita bicara tentang narkoba yang berasal dari produksi kokain mungkin seperti itu hanya, hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja, orang-orang kaya, orang dengan kelas tertentu, sementara yang kelas lainnya yang minum atau tidak ganja kira-kira seperti itu. Tapi sekarang sabu-sabu itu terus sampai ke pelosok, sampai ke tempat-tempat yang tadinya sama sekali kita tidak pikirkan akan sampai ke sana, mulai dari paket besar, paket kecil dan seterusnya.

Tadi saudara Hinca menyebutkan di Medan ada 4 M, murah, meriah dan seterusnya itu. Nah dengan situasi yang seperti itu saya kira anggaran yang diberikan tiap tahun kepada BNN jauh dari cukup. Oleh sebab itu menjadi tidak relevan kita bicara soal PNBP yang besarnya kurang dari 10 miliar untuk sebuah lembaga yang sesungguhnya memerlukan dukungan anggaran yang melebihi dari itu, yang kebutuhannya beratus-ratus kali lipat dari itu.

Soal PNBP misalnya, dulu pernah kita diskusikan juga kemungkinan atau peluang, nanti kita carikan salurannya seperti apa, bagi BNN untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan dimiliki oleh bandar narkoba, miskinkan mereka. Karena dengan asumsi bahwa semua kekayaan yang didapat oleh

kekayaan yang ia peroleh dari jual beli narkoba, maka negara punya hak untuk mengambil itu dan kemudian kalau memang memungkinkan memberikan hasil rampasan itu bagi penguatan operasional BNN, tapi sampai sekarang saya kira itu belum di, belum di, dilakukan.

Saya berpandangan ya, kalau memang kita serius mau perang melawan narkoba dan menang bukan keluar sebagai pecundang dan negara tidak boleh kalah melawan bandar-bandar ini. Saya kira Pak Presiden tadi berkali-kali Bung Tri menyebutkan soal relasi antara Kepala BNN dengan, dengan Presiden yang memang jarang, menurut saya ya. Bisa saja Pak Presiden panggil Kepala BNN, Pak Petrus nih Jenderal yang luar biasa prestasinya kita tau, tinggal panggil dan tanya Pak Petrus berapa anggaran BNN untuk perang dan menang melawan narkoba.

Jadi dibalik logikanya bukan BNN disuruh menyusun anggaran dan kemudian anggarannya dipotong sana-sini dengan alasan negara tidak punya cukup anggaran untuk, untuk itu karena ada kebutuhan yang lebih penting, ada kebutuhan lebih strategis, oleh sebab itu BNN harus apa namanya mengurungkan niatnya untuk sejumlah program yang sudah disusun, maka anda akan dapat, anda hanya dapat sekian saja, menurut saya itu cara berpikir yang harus kita tinggalkan dan kemudian kita balik Presiden panggil atau, atau Pak Petrus susun rancangan anggaran yang diperlukan BNN secara longgar begitu, jangan dipas-paskan, kemudian nanti di presentasikan di Komisi III dan kita akan dukung itu. Jadi buatlah anggaran yang, yang, yang memang anda anggap cukup untuk mendukung sejumlah atau semua operasi akan dilakukan oleh BNN dalam kaitan memerangi narkoba.

Di provinsi itu hampir ga ada kerja BNN. Kalau saya, saya, saya, saya, saya menyimpulkan seperti itu, apa namanya yang, yang lebih menyedihkan lagi kalau dalam kaitan dengan Polri ini, BNP itu hanya sekedar tempat bagi sejumlah perwira Polisi untuk mencari kenaikan pangkat. Mereka dapat promosi bintang satu untuk Ketua BNP, dan setelah itu mereka umumnya ya dengan segala hormat, umumnya mereka tidak tidak serius menjalankan tugasnya sebagai Kepala BNP, ada yang enam bulan kemudian kasak-kusuk menjadi tempat minta pindah kembali ke induk organisasi dan itu terjadi karena tidak misalnya Kepala BNN ini memiliki kewenangan untuk melakukan asesmen terhadap semua Kepala BNP provinsi. Mereka yang tidak punya prestasi tidak berhak untuk menikmati promosi baik di induk organisasi maupun di tempat manapun.

Kalau dianjak, anjak Direktorat Narkotika Mabes Polri itu ada banyak tuh, ajak 10 anak perwira tinggi yang, yang nggak ngapa-ngapain, kan kasihan juga. Kasihan organisasinya, kasihan juga yang bersangkutan.

Saya pernah tanya teman saya yang ada di sana, saya bilang ada berapa tuh anjak di, di Direktorat Narkoba Mabes Polri lebih dari 10 orang. Apa yang mereka analisa 10 orang itu di sana? Kalau mereka menganalisa sesuatu yang kemudian sesuatu itu akan diinputkan kepada Kapolri, Kapolri sudah punya staf ahli saya kira. Jadi jabatan yang mubazir juga. Kenapa tidak kewenangan

diberikan kepada BNN untuk melakukan aesmen yang ini boleh promosi yang ini tidak kira-kira begitu.

Dan sekali lagi saya kira kita semua di Komisi III memberikan dukungan secara *full*, karena kita tau persis bahaya narkoba bagi generasi dan bangsa ini. Saya kira itu.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik selanjutnya kami persilakan Bapak Jacki Uly.

F- P. NASDEM (Drs. Y. JACKI ULY, M.H.):

Beserta seluruh jajaran Anggota DPR Komisi III, Pak Petrus beserta jajaran yang saya hormati dan saya banggakan,

Saya ingin menyampaikan apresiasi sebenarnya di sini, bahwasanya data yang ada di lapangan mengatakan bahwa banyak sekali operasi-operasi narkoba akhir-akhir ini luar biasa hasilnya.

Saya kaitkan dengan realisasi PNPB sampai dengan Maret 2022. Kalau melihat bulan yang berjalan dan hasil yang tahun lalu, saya yakin ini akan mudah-mudahan bisa mencapai target yang sudah ditentukan sebelumnya.

Namun saya ingatkan juga bahwa, karena BNN ini lembaga yang betul-betul akan bergerak total untuk mengatasi masalah narkoba, target PNPB ini kalau menurut saya, seiring sejalan saja dengan operasi berlangsung. Kalau kita ngejar target ini nanti kita bisa anggota jadi jalan menyimpang lain daripada apa yang dikehendaki sebenarnya.

Kemarin saya tertarik jawaban daripada lantasi kemarin waktu dia diminta penjelasan mengenai PNPB dari pada lantasi juga mengatakan hal yang sama, saya bukan tukang cari uang, itu dari tugas kantor saya ini. Saya rasa, sama dengan BNN, target itu kita kerja sekuat mungkin, kalau targetnya dapat besar ya besar, tapi kalau menurut saya orientasi untuk kita menekan angka narkotika di negeri ini.

Kemudian masukkan daripada Bapak mengenai rancangan undang-undang ini, Pak. Coba kita telisi kembali ke belakang mengenai masalah penanggulangan narkoba atau penindakan terhadap narkoba ini. Dulu kami masih ingat, waktu menjabat masih ada daerah interdiksi seperti itu dan saya lihat sudah beberapa sudah tidak difungsikan, mungkinkah, apakah hal-hal seperti ini dan yang lain-lainnya mendukung keberhasilan selama ini perlu kita pertahankan dikaitkan dengan undang-undang untuk narkotika yang akan datang, sehingga hasil yang diharapkan bukan saja lebih besar, lebih mumpunilah hasil untuk tugas dari BNN ini. Karena saya yakin BNN ini

tugasnya cukup berat-berat, karena memang begitu dikatakan narkotika naik orang berpaling ke BNN, bukan ke Direktorat Narkotika misal di Polda, di Polres, di Polsek, tetapi langsung tangan tujuannya pada BNN dan ini berat, berat sekali.

Jadi semoga dengan masukan saya nanti di mana yang mesti di perbaiki. Seperti misalnya umpamakan interdiksi dulu ada, apakah masih berjalan atau tidak sekarang. Prekursor-prekursor itu perlu sekali. Tadi teman-teman menyampaikan benar penting sekali, Pak. Karena kelihatannya perkembangan narkotika dari waktu ke waktu itu sudah bisa menggunakan segala macam zat kimia yang bisa mereka campurkan sehingga menjadi bahan-bahan narkotika.

Saya rasa demikian saya, Pak Petrus beserta rekan-rekan dari BNN. Terima kasih, Pak.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilakan Arteria Dahlan.

F- PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Terima kasih, Ketua.

Pimpinan dan anggota Komisi III yang saya hormati,
Pak Petrus, Kepala BNN beserta jajaran yang saya hormati,

Pertama-tama saya apresiasi BNN anggarannya semakin hari semakin dipepet, tapi kinerjanya membaik, membangun harapan terlihat kerja-kerjanya cerdas dan substantif.

Saya kagum sekali kemarin diundang sama teman-teman BNN bagaimana BNN bisa memperlihatkan dan tau menempatkan diri. BNN ini *leading* sektor, Pak. Jadilah sebagai pemimpin garda terdepan, jadilah sebagai koordinator yang handal. Selama ini kami nggak ngelihat, tapi di bawah kepemimpinan Pak Petrus ya terlihat sekali, memang kita cukup membanggakan, Pak Kepala.

Yang kedua saya juga apresiasi terkait dengan perubahan paradigma. Memang *take line*-nya *war on drugs*, tapi BNN tidak perang ya sebagaimana perang terbuka langsung ada yang namanya *soft approach*, *hard approach*, *smart approach*, bahkan bahasa santunnya BNN membina kerjasama Pak, tapi *take line*-nya *war on drugs*. Ini yang kami katakan BNN sudah tau posisinya, tidak mungkin lagi menjadi tukang sapu yang baik karena sampahnya dimana-mana sekarang Pak, karena contributor sampahnya banyak sekali, karena kanal-kanal yang seharusnya mendukung BNN pun belum tentu iramanya sama.

Nah kami sekarang rapatnya RDP tentunya lebih menitiktopiknya ini kan terkait dengan PNBPNya BNN, enggak, karena Bapak ini tidak perlu dibebani untuk berkontribusi atau menghasilkan PNBPNya BNN, tugas bapak itu hubungannya yang mulia, kemuliaan Pak. Tapi okelah hukum negara memperkenankan adanya PNBPNya BNN, apresiasi capaiannya naik. Nah karena memang PNBPNya BNN, jadi kami juga ingin nanti Pak Kepala sumber mata airnya dari mana saja, berapa jumlah besarnya biar nanti kami bisa membantu juga, dari mana saja yang bisa kita lakukan penguatan.

Tadi dikatakan ada yang namanya korban, saya enggak sepakat, kita bicarannya penyalahgunaan korban istilah hukumnya kan seperti itu. Ya penyalahgunaan korban itu direhab, tapi rehabnya BNN ini kan gratis Pak ya? Gratis Pak Ketua. Kalau kita mau ngarepin dia pakai PNBPNya BNN ini udah bagus karena yang bisa di duitin aja dibuat gratis. Rehab gratis itu. Nah kemudian juga beberapa giat-giat ini pun juga semuanya nirlaba, Pak.

Jadi kalau kita mau minta mereka kerja bener ningkatin PNBPNya BNN bukan pada tempatnya, kemudian juga dikasih hak bagi mereka untuk pungut, jangan dia gratisan tapi ditarget ongkosnya besar.

Kami juga ingin sampaikan nanti Pak Kepala ada berapa PR kita Pak terkait dengan masalah anggaran. Pak Kepala ini 1,8 T, belanja modal 600, yang kerjanya benar 500 miliar untuk seluruh Indonesia. Lalu Pak Ketua penghasilannya setahun 500 miliar ada, Pak Ketua ya. Ini sak BNN, Pak Ketua. Bayangin aja Pak sebanyak ini dengan tugas, mungkin transaksi bandar narkoba sehari kurang Pak, lebih dari 1,8 T Pak, tapi kita setahun itu.

Nah kami mohon di sini melalui forum ini nanti didata lagi Pak Kepala Provinsi Kabupaten/Kota yang belum punya Perda P4GN mana, itu jauh lebih penting daripada mikirin PNBPNya BNN. Bagi yang mereka enggak kita kasih lagi Pak, enggak boleh ketemu lagi Pak dalam rapat-rapat ini karena mereka bukan bagian daripada *spirit* perjuangan bersama darurat narkoba. Kenapa gitu, karena Perda P4GN ini gerifatifnya banyak dan isinya uang dan misalnya kebijakan-kebijakan BNN jadi gratis, kerjasama dengan pemda, dengan pemkot, kementerian/lembaga dan sebagai, halal-halal Pak. Ada inpres 2 2020 untuk itu.

Nah ini khusus untuk mitra kita yang BNN kami berharap Pak Ketua urusan PNBPNya BNN tidak dijadikan isu, tapi bagaimana membantu mereka untuk memastikan Perda P4GN-nya hadir, Inpres 2 2020 dilaksanakan secara murni dan konsekuen oleh semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, ini jauh-jauh lebih penting daripada bicara PNBPNya BNN.

Berikutnya mengenai masalah TPPU. Saya termasuk orang yang belum sepakat, bukan berarti tidak sepakat untuk menugaskan BNN mengejar TPPU dilarikan lagi nanti ke PNBPNya BNN kasihan mereka Pak, buat kejar bandar aja udah sempoyongan Pak, apalagi merampok atau merampas uang yang sudah dikasih rekening orang-orang Pak, nanti kasihan Pak Kepala di kriminalisasi Pak, untung ini kuat jagoan Pak, tapi kita enggak bisa kalau beliau diganti atau

siapa belum tentu semua orang bisa untuk menjalankan giat-giat yang kita harapkan. Nah tetapi bisa dijadikan bagian daripada pencermatan Pak Kepala terkait dengan masalah TPPU ini apakah mungkin nanti dikaji sebagai sumber atau istilah saya mata air pendapatan PNBPN dari BNN.

Saya pikir teman-teman sudah banyak, itu saja Pak Kepala. Selamat bertugas Bapak/Ibu semua. Bapak Ibu ini adalah patriot merah putih dan upahnya di surga.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik selanjutnya kami persilakan Kakanda Romo Haji Muhammad Syafi'i.

F- P. GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, S.H., M.Hum.):

Makasih.

Pimpinan dan anggota Komisi III yang saya hormati,
Kepala BNN beserta seluruh rekan sejawat yang hadir,

Ketika saya membaca masukan terhadap revisi Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka saya semakin paham usulan-usulan yang Bapak-bapak sampaikan ini memperjelas *core* bisnis atau tupoksi dari BNN itu, itu lebih pada bagaimana mereka merehabilitasi korban-korban narkotika.

Saya ga usah baca lagi lah di tangan kita masing-masing.

Kemudian, waktu saya baca jenis PNBPN BNN dari Balai Besar Klinik BNN Provinsi, Kabupaten/Kota, Pusat Laboratorium Narkotika, Direktorat Psicotropika, semakin jelas *core* bisnis rehab itu, bahwa kegiatan-kegiatan yang oleh BNN dianggap menjadi sumber dari PNBPN itu tidak lain adalah semua kegiatan dalam rangka meminimalisasi penggunaan dan merehabilitasi korban.

Ini dari 2 tangkapan ini pertama saya ingin komentar, terkadang kami terlalu berharap besar ini kepada BNN, padahal tupoksi-nya lebih bagaimana meminimalisir dan merehab korban, sehingga muncul harapan macam-macam yang ketika dikonfirmasi dengan *core* bisnis BNN maka harapan yang besar itu selalu melahirkan *statement-statement* kekecewaan.

Karena itu Bapak-bapak dan Ibu-Ibu dari BNN, saya sepakat dengan kawan-kawan tentang realisasi PNBPN ya, 2020 *target* 1,2 realisasi 5,2. 2021 9,4 *target*, realisasi 13. Mohon maaf ini Pak Petrus, saya justru bertanya-tanya kok bisa sehebat ini gitu. Saya malah bertanya apa enggak bisa ditingkatkan, saya malah bertanya dengan *core* bisnis dan tupoksi yang sangat jelas tadi

masih bisa BNN menghasilkan PNBP sebesar ini, apalagi dari semua mitra kerja yang ada di Komisi III Pak, dan kami ucapkan terima kasih baru BNN yang sanggup memberikan kami jaket, yang lain ga ada kan. Mau polisi, mau Jaksa dan itu sangat bagus sampe-sampe hari ini mau saya pakai gak bisa karena habis dicuci tadi, karena keseringan dipake seperti itu.

Ini justru luar biasa bisa sampai 13 miliar. Saya terharu Pak di sini, salah satu strategi untuk meningkatkan PNBP termasuk menyewakan ke supermarket gitu loh, ada gambar Indomaret di situ. Ini kreativitas yang luar biasa ya.

Jadi saya sepakat dengan kawan-kawan ya walaupun masih mungkin ditingkatkan dengan berbagai macam ini, saya kira itu bukan sesuatu yang terpenting yang harus dilakukan oleh BNN, tapi yang paling penting adalah bagaimana sukses merealisasi tentang siapa produsen prekursor dan dijaga ketat, selain itu berarti melanggar aturan, siapa yang mendistribusikan, yang yang dapat izin ekspor, dapat izin impor itu diperketat, yang lebih dari itu berarti melanggar peraturan harus ditindak dan kemudian apa upaya maksimal yang kita lakukan sehingga Lapas tidak penuh tapi kemudian dengan eksaminasi dari BNN korban-korban itu bisa direhab dan yang tadi kan rehabnya juga gratis, maka benar itu mengharapkan penerimaan negara bukan pajak yang tinggi dari BNN saya kira itu lagi-lagi harapan yang menurut saya kurang relevan dengan *core* bisnis yang ada di BNN, yang paling relevan itu adalah memperketat siapa yang memproduksi, siapa yang mendistribusikan, siapa yang ekspor-impor, uji klinik ada orang yang apakah dia sudah menggunakan narkoba atau tidak dan memaksimalkan upaya merehabilitasi korban-korban narkoba.

Saya kira di situ keberhasilan BNN, bukan pada tingginya PNBP yang bisa disetorkan kepada negara, apalagi kami juga nggak melihat hubungannya apakah PNBP ini menjadi dukungan pembiayaan kerja BNN atau tidak sama sekali, sehingga saya kira bagus yang bisa menghasilkan PNBP seperti ini, tapi kalau saya dari Fraksi Gerindra justru berharap BNN sukses dalam *core* bisnis yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyelamatkan republik ini.

Terorisme itu serius *crime*, dananya besar Pak;

Korupsi *extra ordinary crime*, dana operasional besar;

BNN bahkan sampai ada istilah perang dengan narkoba kayanya sangat rendah.

Saya kira Bapak harus serius juga melihat apa fenomena ini untuk ke depan tidak kemudian begitu menerima saja kalo kasih anggaran yang menurut kami ga cocok untuk perang terhadap narkoba.

Selamat bertugas kawan-kawan BNN.

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Hadirin yang kami hormati,

Kita telah mendengarkan pertanyaan pendalaman dari kawan-kawan anggota Komisi III.

Kami persilakan Pak Petrus untuk menjawab secara makro, detailnya nanti biar dijawab secara tertulis paling lambat 1 minggu nanti diserahkan ke sekretariat Komisi III.

Silakan, Pak Petrus.

Yang udah keluar orangnya nggak perlu di jawab.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (Dr. PETRUS REINHARD GOLOSE):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang pertama kami menjawab dari Pak Wayan Sudirta.

Terima kasih Pak Bapak selalu sama-sama. Kemarin saya juga memberikan ceramah di tempat ini, seharusnya Bapaknya menjadi monitor, moderator tapi kelihatannya diganti kemarin.

Kemudian Bapak selalu memberikan perhatian kepada penanggulangan narkoba. Kami sangat apresiasi juga Pak dan memang dalam Undang-Undang ini Pak semangat untuk rehabilitasi, jadi bukan jadi dari surat edaran Mahkamah Agung, suart edaran itu sebenarnya hanya karena jumlah pakai sehari Pak, tapi juga sekarang nantinya seperti yang Bapak sampaikan karena tingkat kepenuhan di Lembaga Masyarakat yang sangat tinggi, di daerah-daerah itu sekitar 50%, kemudian di kota besar di atas 70%, bahkan di kampungnya Pak Hinca lebih itu karena banyak sekali pemain narkoba di sana itu, Pak.

Ini menjadi catatan kami juga dan memang salah satu usulan tadi kami untuk rehabilitasi ini karena dalam undang-undangnya Pak, yang undang-undang *existing* 35 hanya dituliskan ada Pasal 55 nya wajib diadaptasi, kalau sekarang akan melalui prosedur dan akan dibahas undang-undang yang merupakan usulan dari pemerintah juga berkaitan dengan tim asesmen terpadu dan itu sebelumnya diatur dengan keputusan bersama dari BNPT, BNN, kemudian dengan Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan dan Polri, Pak.

Terima kasih masukannya Bapak untuk rehabilitasi.

Kemudian Pak Heru. Terima kasih juga Pak masukan Bapak, secara umum saya rasa hampir sama dengan Pak Wayan. Kemudian jenis PNBP yang seperti Bapak tanyakan itu termasuk juga pertanyaan dari Pak Hinca, itu hanya ada 23 perusahaan Pak dan bukan, kami hanya memberikan rekomendasi termasuk Mabes Polri, tetapi izinnya adalah di Dirjen Perdagangan Luar Negeri, kemudian keputusan menteri-nya itu pada waktu kementerian masih bersama antara Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Jadi sebenarnya kami hanya turut mengawasi, tetapi bukan berarti prekursor yang seperti dalam bayangan kita untuk *blender stainless*, itu Pak.

Jadi kemudian terima kasih masukan Bapak website ini karena berkaitan juga dengan digitalisasi (**Suara tidak jelas ... 01.40.35**), kemudian kalau memang untuk *lead* itu ada *website*-nya sendiri, Pak.

Jadi kita ini untuk pelayanan, karena kalau semua kita sekarang memang untuk kami laporkan juga bahwa kita sekarang lagi membuat *blueprint*, Pak. Jadi setelah saya masuk menjadi Kepala, saya melihat bagaimana ini semua kan kita buat *system* Pak, sehingga harus ada *blueprint*, sehingga tidak sendiri-sendiri, tidak setiap satker tidak berpendapat sendiri-sendiri Pak yang kita buat satu kesatuan bahwa sistem sehingga bahasa *programming*-nya bisa sama dan bisa dilakukan untuk pelayanan maupun untuk operasi, Pak.

Jadi dibedakan antara secara umum untuk layanan yang terbuka, kemudian juga nanti secara intelejen, berkaitan dengan operasi-operasi yang harus dilakukan kami.

Kemudian terima kasih juga Pak atensi Bapak berkaitan dengan kinerja, kemudian revisi yang berkaitan dengan PNBP memang, kami bukan untuk *profitable* Pak, tapi karena diminta untuk mencari PNBP ada aturannya ya ditakutkan seminimal mungkin tidak memaksa, bahkan untuk rakyat kecil selama dia mempunyai tidak mampu tidak bayar dia, Pak. Jadi tidak merupakan keharusan dan Bapak lihat kalau tadi dikatakan dibandingkan dengan institusi yang lain, kita PNBP kan kecil sekali karena bukan itu yang kami kejar.

Kemudian Pak Trimedya, saya rasa Pak Trimedya yang membuat BNN RI adalah dengan keputusan, jadi yang udah dilakukan oleh Ibu Mega nanti mungkin saya juga akan laporkan Bu Mega, usulan Bapak untuk bubarkan.

Jadi saya rasa tidak perlu lagi kita bahas tentang ini, karena itu ada Keppres yang dibuat langsung Ibu Megawati di zaman pemerintahan dia dan kami baru sekarang 20 tahun melaksanakan ulang tahun BNN, yang tanda tangan adalah Presiden pada saat waktu itu adalah Ibu Megawati, tapi terima kasih Pak masukan dari Bapak.

Kemudian juga terima kasih juga untuk anggaran yang diperkuat. Kemudian angka 13 miliar itu Pak, memang dari SKHPN dan tadi (**Suara tidak jelas 01.42.54**), tapi kalau dibandingkan dengan kegiatan yang kami lakukan memang kami tidak mencari untuk PNBP yang berlebihan untuk BNN, karena

kita memang lebih cenderung bagaimana seperti yang sampaikan Romo adalah untuk menyelamatkan.

Kemudian kaitan dengan barang bukti Pak, walaupun diluar daripada diskusi pada siang hari ini. itu ada *controlling* yang luar biasa dan kalau berkaitan dengan Direktorat Narkoba dan sebagainya tadi Pak mungkin bukan kami yang ditanyakan tetapi kepada Kapolri. Karena kami adalah Kepala BNNP yang dibalik di wilayah, bukan Direktorat Narkoba yang di bawah kami tapi adalah secara struktur adalah kementerian dan lembaga, Pak. Jadi memang saya polisi Pak, tetapi kami sekarang ini adalah kepala lembaga, bukan dari unsur polri, tapi kami adalah anggota Polri sekondit, jadi yang bekerja di Badan Narkotika Nasional.

Tapi terima kasih Pak masukkan Bapak selalu baik, terutama di Sumatera Utara. Tentu kepada BNNP Sumatera Utara sampai kegiatan kita pun yang bersangkutan tidak hadir karena harus mendampingi Bapak jadi. Kemudian saran Bapak untuk anggaran diperkuat tentunya kami sangat apresiasi.

Kemudian Pak Adang, memang kalau dibilang kami akan perinci, tetapi karena sesuai saran Bapak kami akan susulkan, cuman kembali lagi bahwa untuk PNPB BNN ini kami sangat kecil, kami tidak mengejar itu dan ini kami buat sekedar karena ada instruksi yang memang juga harus kita lakukan, tetapi kembali lagi kepada saran yang Pak Romo tadi, ini kami lakukan dan tidak memaksa, Pak.

Jadi kemudian target kenapa targetnya tidak besar, karena sudah dalam keadaan Covid Pak, prefelensi naik sehingga kami juga tidak memaksa target yang muluk-muluk. Karena jangan sampai orang dalam keadaan Covid dan juga bahaya narkoba.

Kemudian *leading institution*, ya Pak. Karena memang dalam keputusan bersama yang oleh pemerintah sebelum undang-undang diajukan, ditunjuk BNN sebagai *leading sektor*, *leading institution*. Karena pada waktu nantinya dilakukan tim asesmen terpadu apabila ada tersangka secara objektif yang harus dilakukan *criminal justice system* harus melewati ini Pak, sehingga diperkuat, diperkuat dalam Undang-Undang, diperkuat dalam Undang-Undang. Nantinya mohon dukungan dari Bapak-Bapak sehingga jelas, karena dalam undang-undang *existing* yang ada hanya disebutkan wajib untuk direhabilitasi, tidak dijelaskan siapa yang berserat, sehingga dalam *criminal justice system* proses antara Polri, Jaksa, kemudian nantinya hakim sehingga juga sudah banyak interpretasi yang berbeda, sehingga dibutuhkan lembaga itu. Apakah nantinya dimasukkan dalam undang-undang atau nanti turunan berupa peraturan pemerintah, silakan Bapak-bapak yang nantinya akan menggodok undang-undang ini.

Kemudian secara jumlah narkotik yang ditangkap seperti yang Bapak sampaikan, untuk kami sendiri Pak sampai dengan saat ini, jadi kami mohon koreksi juga tadi mengatakan BNNP tidak bekerja, banyak sekali yang dilakukan terutama BNNP jalur Sumatera, Pak. Ini kemudian yang dilakukan operasi-operasi terpadu yang kita lakukan termasuk jawaban tadi untuk

interdiksi, kita lakukan di utara daripada pulau Sumatera banyak sekali masuknya barang dari *golden triangle* dan bisa kita cegah, termasuk yang sudah masuk ke wilayah-wilayah dilakukan oleh BNNP, Pak. Kami sudah sekitar 700, lebih dari 700 kilogram yang bisa diselamatkan.

Tahun lalu dengan jumlah anggaran kami yang kecil Pak Arteria itu hadir waktu itu kita bisa menyelamatkan dari, lebih daripada 3,3 ton. Jadi total dari tahun lalu sampai dengan awal tahun ini sudah sekitar 4 ton Pak dengan anggaran BNN yang tentunya Bapak sendiri pahami dan daritadi kita bicara tentang anggaran, kira-kira begitu Pak kurang lebihnya.

Kemudian untuk perusahaan yang lain itu bukan institusi kami Pak.

Kemudian Pak Hinca. Pak Hinca, kita tetap sangar saya, kita terima kasih kepada Bapak.

Kemudian tentang tim asesmen terpadu tadi, saya rasa, saya udah jelaskan secara umum, kemudian strategi dengan 5 target ini bahwa kita memang mempunyai target, tapi kita tidak paksakan Pak karena saya lihat semangat juga daripada anggota DPR termasuk kami Pak, bahwa kami tidak mengejar target PNPB untuk menekan sampai karena berhadapan dengan hal-hal yang terutama untuk masyarakat kecil itu untuk yang tidak mampu itu nol Pak tidak dibayar, tidak bayar jadi saran Bapak juga.

Kemudian data perusahaan juga saya rasa sudah saya jawab 27 perusahaan dan terkontrol.

F- PKB (HERU WIDODO, S.Psi.):

Pak Ketua, mohon izin Pak Ketua mumpung saya ingat. Pak Jendral mohon izin.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (Dr. PETRUS REINHARD GOLOSE):

Tunggu, Pak Ketua udah kasih ini karena saya belum jawab karena belum diizinkan.

KETUA RAPAT:

Oke silakan, satu menit ya.

F- PKB (HERU WIDODO, S.Psi.):

Ini mumpung saya ingat, tadi disampaikan oleh Pak Hinca termasuk Pak Trimed dan termasuk saya sendiri. Ini terkait dengan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika Pak karena ini ada PP-nya, Pak. Jadi mau tidak mau kemudian BNN pasti akan melakukan ini, Pak. Makanya tadi disampaikan oleh Pak Trimed kalau suatu ketika nanti Pak Jendral ketemu dengan Pak Presiden tolong disampaikan bahwa ini sangat memberatkan bagi masyarakat kita. Saya

setuju ketika misalkan BNN kemudian tidak apa namanya mengutamakan penerimaan negara bukan pajak setuju sekali, tapi juga perlu diingat bahwa apa namanya tarif yang sudah ditetapkan melalui peraturan pemerintah juga saya kira memberatkan bagi masyarakat kita. Makanya tadi saya bilang, saya Pak Trimed dan Pak Hinca ini sangat setuju sekali ketika kalau perlu ini di gratiskan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba ini, Pak. Misalkan begini, saya bandingkan kemarin dengan SKCK. SKCK itu kalau nggak salah kemarin 30.000 atau berapa, itu masa berlakunya kalau tidak 6 bulan, sementara ini surat hasil pemeriksaan narkoba kalau tidak salah 3 bulan Pak ya masa berlakunya.

Nah maksud saya dengan harga yang 290.000 kemudian dengan masa berlaku 3 bulan ini sangat memberatkan, Pak. Jadi saya mohon pada Pak Jenderal nanti ketika misalkan menghadap Pak Presiden tolong disampaikan Pak bahwa ini betul-betul memberatkan bagi masyarakat kita.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Kepala.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (Dr. PETRUS REINHARD GOLOSE):

Terima kasih masukannya. Perlu saya sampaikan bahwa untuk pemeriksaan 6 kategori aja harganya 300.000, kita 7 harganya 290. Jadi kalau memang semangat itu kami juga berusaha, tapi kan kami harus ikut aturan yang ada. Kami juga berusaha, saya kan juga instruksikan tapi kan prosesnya panjang.

Terima kasih masukannya, Pak.

Tidak ada semangat kita untuk bahwa kita yang untuk ini, tetapi perlu saya sampaikan bahwa ini adalah keharusan juga dari mereka untuk misalnya pegawai untuk mendaftarkan dan bukan cuma kami Pak, ada institusi yang lain juga melakukan ini, bukan cuman BNN, jadi bukan hanya BNN.

Terima kasih masukan, Pak.

Semangatnya sama, Pak Heru ya.

Kemudian Pak Hinca sama saya rasa saya sudah jawab Pak untuk target saya turunkan karena dengan situasi Covid dan saya tadi liat agak kontradiksi antara bapak suruhkan turun kemudian naik, tetapi hampir-hampir sama, mungkin bisa diskusi berdua juga Pak kaitan dengan itu.

Terima kasih, Pak.

Berikutnya Pak Ichsan kaitan dengan PNBPN yang ini, ini bisa saya lihat terima kasih masukannya, tetapi memang kami tidak mengejar itu Pak untuk PNBPN ini, karena di tempat rehabilitasi ini juga bukan ini yang sekarang, kita gratis Pak jadi.

Kemudian kalau memang lebih ditingkatkan kita kan sesuai dengan yang ditargetkan, Pak.

Kemudian tidak ada, menurut Bapak tidak ada penguatan justru penguatan di sini, Pak. Untuk kegiatan yang lain BNN sebagai penyidik sudah ada Pak, yang belum diatur terutama yang berkaitan dengan rehabilitasi dan tim asesmen terpadu ini, Pak.

Kemudian satu lagi Pak yaitu *new psychoactive substances*, jadi zat-zat baru yang harus diperiksa dulu sehingga kita bisa melakukan. Di dunia itu ada 1.124 Pak, kemudian termonitor kita ada 87, kemudian kita harus melegalkan, maksudnya membuat ini dalam aturan Pak, sehingga kalau pada waktu kita melakukan penindakan, terutama yang sekarang contohnya adalah tembakau gorila yang dipasang itu seperti itu, Pak.

Kemudian kalau terobosan yang ada, terobosan seperti ini Pak. Jadi untuk bahwa orang ini apakah harus, tapi begini, tidak semua juga punya penyalahgunaan, kita harus bilang bahwa ingat bahwa *victim less crime* ini, dia adalah pelaku dia juga korban Pak sehingga kita juga mengusulkan tidak boleh dua kali dia, kalau dua kali ya tetap harus proses. Karena kalau nggak ya dia ini lagi dia, dia ngaku lagi dia hanya pemakai, apalagi bukti yang ditemukan tidak sesuai dengan yang harusnya kita untuk melakukan atau melaksanakan *criminal justice system* kepada yang bersangkutan.

Tapi sekali lagi terima kasih masukan dari Bapak untuk penguatan daripada BNN.

Kemudain Pak Mulfachri. Oh udah pergi ya, jadi saya tidak jawab tapi saya mau ini Pak, saya mau menyatakan beliau mengatakan bahwa tidak ada terjadi BNNP, saya tidak setuju sama sekali Pak, karena semangat kita ada di daerah. Yang disampaikan oleh yang pergi, yang pindah itu sekarang adalah di Mabes Polri dan selama saya menjadi Kepala BNNP tidak ada yang minta pindah, bahkan banyak sekali Pak, biasanya jabatan cuma 3 yang daftar 30.

Jadi bukan berarti hanya sekedar datang kemudian pindah, selama kepemimpinan saya ini jadi. Saya memang mau menyampaikan sebenarnya, sehingga diketahui bahwa semangat kami itu ada di provinsi juga Pak walaupun dengan anggaran yang biasa tapi mereka berbuat. Jadi tidak boleh dikatakan bahwa, tidak ada kerjaan. Banyak sekali Pak yang mereka lakukan.

Jadi, tapi dukungan kepada kami kami terima Pak dari beliau, hanya saja itu aja. BNNP dengan yang terbatas tapi mereka bekerja luar biasa. Kalau ada yang minta pindah itu kembali ke Mabes Polri itu sudah menjadi catatan, sehingga tidak menjadi promosi sampai dengan sekarang, jadi orang-orang

tertentu tapi tidak boleh kami disalahkan oleh institusi, kami akan bela sampai mati Pak institusi ini.

Terima kasih Pak walaupun tidak ada tapi saya jawab karena ini berkaitan, karena dilihat publik Pak ini, kami berbuat, Pak.

Kemudian Pak Jacki Uly, terima kasih Pak apresiasi Bapak. Karena anaknya beliau juga saya libatkan untuk operasi anti narkoba.

Kemudian kaitan dengan interdiksi, Pak. Kami ada Direktorat interdiksi, ada Direktorat interdiksi dan kami ada 7 intridiksi, tentu tidak semua bisa kami sampaikan Pak di publik karena berkaitan dengan operasi intelijen, berkaitan dengan *interdiction*. *Interdiction* itu ada *port interdiction*, ada *c-port interdiction* dan *airport interdiction* itu kita lakukan dan Direktornya dari Bea Cukai, Pak.

Jadi kita lakukan memang lintas institusi Pak sehingga saya rasa yang Bapak sampaikan tadi berkaitan dengan *interdiction* kami ada Pak, *interdiction* kita lakukan dan itu dengan beberapa kementerian dan lembaga, termasuk dengan Bakamla, kemudian dengan Bea Cukai, dengan Kementerian Kelautan dan sebagainya itu banyak menghasilkan operasi yang baik, terutama sinergitas, Pak.

Saya setuju dengan yang dikatakan oleh Pak Arteria bahwa kita bisa memposisikan menjadi *leading institution* bersama-sama dengan institusi lain. Kemudian terima kasih Pak buat dukungan Bapak kepada intitusi kami.

Kemudian Pak Arteria Dahlan. Oh sudah pergi, mukanya hampir sama Pak ini pindah-pindah, pindah posisi. Karena tidak ada serangan dari Pak Arteria jadi kira-kira.

Ini kemudian terakhir Pak Romo suhu, terima kasih Romo selalu memberikan wejangan. Saya perlu sampaikan bahwa, *core* bisnis kami bukan hanya rehabilitasi, Pak. Yang kami tonjolkan ya rehabilitasi karena semangat Undang-Undang 2009 memenjarakan orang Pak sekarang, kemudian semangat yang seperti masukan dari seluruh rekan-rekan anggota Komisi III yang terhormat terutama Pak Wayan dan Bapak kita, tetapi semangat kita juga bagaimana melakukan *preventing*, Pak. Jadi dari hulu sampai hilir di lakukan oleh BNN dan ini hanya satu-satunya institusi yang melaksanakan ini Pak mulai dari *preventing* pencegahan, kemudian kita melakukan *improvement* pemberdayaan masyarakat kita lakukan dan kita presentasikan juga di PBB di *united nation*.

Kemudian kita melakukan juga pemberantasan yang menjadi salah satu *core* bisnis dan dengan jumlah anggota BNN yang tidak banyak kami bisa melakukan kegiatan ini termasuk rehabilitasi. Kemudian karena memang tempat fasilitas mungkin Bapak ada waktu itu kunjungan Komisi III, lihat pojok kecil ya *minimarket* pun kita laporkan sini Pak karena memang kecil tapi sewanya 15 juta, Pak. Jadi, tapi ini harus kita laporkan sekecil apapun karena berada di lingkungan kami.

Kemudian produsen prekursor, produsen prekursor. Kalau kemudian yang ada Pak untuk yang non farmasi tadi sudah saya sampaikan, tetapi yang Bapak lihat atau yang lihat bahwa dalam barang bukti yang sekarang ini adalah kaitan dengan Metamfetamin itu berasal dari luar negeri Pak, berasal dari *golden triangle* kemudian dari *golden creation* yang kita lakukan operasi-operasi bersama dengan *stakeholders* yang lain.

Jadi rata-rata prekusornya sudah menjadi narkotika Pak pada waktu, tapi bahannya karena kita nggak punya di Indonesia ini Pak untuk prekursor daripada metamfetamin, kita tidak ada di Indonesia, itu kita *import* dari negara-negara yang lain, banyak sekali negara termasuk yang paling besar dari China dan India.

Saya setuju Pak, Bapak menyatakan juga kinerja kami bukan dilihat dari PNBPN terima kasih Pak masukkan Bapak.

Saya rasa itu, Pak Pimpinan Komisi III yang kami hormati.
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.

Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Kepala BNN.

Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia,

Tolong konsep kesimpulan tayangkan.

1. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan BNN RI mengenai capaian PNBPN tahun 2021 dan target pencapaian PNBPN tahun 2022, serta program-program prioritas dan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pencapaiannya;

Gimana ada koreksi? Setuju? Pak Petrus gimana, setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)

2. Komisi III DPR RI meminta BNN agar menyampaikan data mengenai penerimaan negara bukan pajak selama 3 tahun terakhir dan kemudian disampaikan kepada Komisi III;

Setuju?

(RAPAT:SETUJU)

Lanjut.

3. Komisi III DPR RI mendukung.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (Dr. PETRUS REINHARD GOLOSE):

Mohon izin Pak untuk PNBPN kita baru mulai kalau tidak salah 2020, Pak. Jadi kalau 5 tahun kita ambil 5 tahun darimana?

KETUA RAPAT / F- P. PAN (PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Saya tarik dulu Pak ya.

(RAPAT:SETUJU)

Betulkan itu, koreksi.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (Dr. PETRUS REINHARD GOLOSE):

3 tahun aja.

KETUA RAPAT / F- P. PAN (PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Iya 3 tahun terakhir, setuju Pak ya?

(RAPAT:SETUJU)

3. Komisi III DPR RI mendukung penguatan dan eksistensi BNN dalam revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam upaya optimalisasi dan peningkatan tugas dan fungsi BNN dalam penyalah guna dan pemberantasan, serta rehabilitasi.

Gimana, Pak Petrus?

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (Dr. PETRUS REINHARD GOLOSE):

Mungkin bisa pencegahan dan serta rehabilitasi, Pak.

KETUA RAPAT / F- P. PAN (PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Pencegahan serta rehabilitasi.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (Dr. PETRUS REINHARD GOLOSE):

Pencegahan dan pemberantasan, serta rehabilitasi.

KETUA RAPAT:

Oh iya, pemberantasan serta rehabilitasi. Tambahin korban narkotika.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (Dr. PETRUS REINHARD GOLOSE):

Penyalahguna mungkin Pak ya, penyalahguna istilah Pak Hinca tadi itu, Pak.

F- P. DEMOKRAT (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):

Pak Ketua, kira-kira sedikit saja Pak Ketua mohon maaf.

Poin nomor 3 ini Pak Kepala BNN, poin nomor 3 ini kira-kira kami meskipun waktunya terbatas karena kita akan mengakhiri rapat ini, kira-kira apa komitmen daripada Kepala BNN dan jajaran terkait poin 3 ini, sehingga kemudian dukungan ini bisa berjalan dengan baik dan harapan yang kita harapkan itu bisa kita laksanakan.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (Dr. PETRUS REINHARD GOLOSE):

Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, tadi sudah dijelaskan bahwa kita pertama bahwa kita akan melakukan yang paling penting adalah tim asesmen terpadu Pak untuk bisa berkaitan dengan proses apakah kita dibawa kepada ranah untuk komposeri atau *volunteer* dalam rangka rehabilitasi.

Kemudian kita menentukan *new psychoactive substances*, karena yang barang yang ada yang kita bicarakan daripada umumnya belum masuk pada kategori *new psychoactive substances*, zat *psychoactive* yang baru, yang terdeteksi yang saya sudah sampaikan di dunia.

Jadi ini kemudian kita dengan adanya undang-undang ini kita bisa meminimalisir yang tadinya orang masuk ke lembaga masyarakat nantinya akan ke rehabilitasi, sehingga strategi kita akan menyiapkan bagaimana pelaksanaan rehabilitasi baik ringan dan juga berat yang bisa kita lakukan.

Kemudian untuk poin nomor 3 kaitan dengan pertanyaan Bapak, jadi berkaitan ini korban penyalahguna dan pecandu narkotika mungkin, Pak. Ya.

KETUA RAPAT:

Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia,

Dengan telah selesainya pembicaraan materi rapat pada hari ini, maka selesai sudahlah seluruh rangkaian rapat kita pada hari ini.

Apabila tidak ada yang dibicarakan lagi, rapat dapat kita akhiri dan ditutup dengan ucapan terima kasih atas kehadiran Pimpinan anggota Komisi III DPR RI dan seluruh Kepala, dan Kepala BNN RI beserta seluruh jajaran.

Demikian rapat secara resmi saya tutup dengan ucapan
"Alhamdulillahirabbilamin".

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.00 WIB)

Jakarta, 29 Maret 2022

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001